

MEMAHAMI POLA REKRUTMEN GERAKAN ISLAM TRANS-NASIONAL di INDONESIA

Oleh Dardiri

Abstrak : *Tulisan ini mendiskusikan beberapa aspek dalam memahami pola rekrutmen gerakan Islam Trans-Nasional di Indonesia. Diantara model yang dikembangkan adalah mereka mengedepankan slogan pemberantasan khurafat dan takhayul serta menuduh praktek bid'ah dari keagamaan masyarakat muslim Indonesia selama ini, khususnya terhadap para pengikut Nahdlatul Ulama atau nahdyyin, Tarbiyah Islamiyah dan Jemaah Tabligh. Melalui propaganda ini mereka seolah menjanjikan Islam yang orisinil sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Tentunya bagi masyarakat awam agama tapi terdidik secara intelektual hal tersebut seringkali menjadi tawaran yang solutif terhadap kekacauan hidup yang melanda lingkungan di sekitar mereka.*

Kata Kunci: *Trans-Nasional, Islam, Organisasi Sosial Keagamaan*

MEMAHAMI POLA REKRUTMEN GERAKAN ISLAM TRANS-NASIONAL di INDONESIA

Oleh Dardiri

Pengantar

Masyarakat muslim di Indonesia hampir tidak pernah berhenti mengalami cobaan berupa pergolakan politik maupun sosial baik dari dalam maupun dari luar. Sejak masa kemerdekaan, kelompok Islam harus berhadapan dengan kelompok komunis dan nasionalis dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, hingga pada tahun 1965 meletus gerakan bersenjata komunis yang harus dihadapi secara fisik bersama TNI. Selanjutnya, di masa Orde Baru awal, Islam adalah kelompok yang harus dicurigai secara terus menerus, khususnya para penganut Islam ideologis, hingga pada masa ini kerap dijumpai penangkapan dan penghilangan para aktifis Islam yang dianggap dapat mengganggu stabilitas politik pemerintahan Suharto. Barulah setelah pada tahun 1981 Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas, rezim Suharto mulai melunak terhadap Islam. Hilangnya kecurigaan pemerintah secara berangsur-angsur telah dimanfaatkan secara baik oleh beberapa intelektual muslim untuk menunjukkan kontribusi mereka dalam pembangunan bangsa.

Namun, belum lama setelah rezim represif ini bermesraan dengan kelompok Islam, yang ditandai dengan muncul dan pentingnya posisi ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dalam mendorong kemajuan masyarakat Islam Indonesia hingga munculnya era reformasi, bermunculan pulalah gerakan trans nasional Islam, seperti Hisbut Tahrir dan gerakan Salafi Wahabi yang pada taraf tertentu berpotensi

mengancam sendi keharmonisan antar masyarakat Islam dan pemeluk Islam dengan non muslim, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial dan terganggunya pembangunan bangsa Indonesia.

Sesungguhnya benih-benih gerakan Islam global yang tumbuh di Indonesia ditandai dengan gerakan bawah tanah sejak tahun 1970-an dan 1980-an diakibatkan oleh sikap represif rezim waktu itu (Orde Baru) dan pengaruh kebangkitan Islam di berbagai belahan dunia. Revolusi Islam Iran yang digelorakan oleh Imam Khomeini tahun 1979 turut meramaikan suasana kebangkitan tersebut. Sikap represif pemerintah RI kala itu cukup menekan berbagai gerakan, namun meninggalkan efek domino perlawanan yang makin keras para aktivis gerakan hingga rezim orde baru tumbang pada puncaknya 21 Mei 1998 dan dimulainya era reformasi. Era tersebut menampilkan kebebasan beraspirasi dan berekspresi di jalur politik yang sebelumnya berada dalam kontrol ketat rezim. Era tersebut ditandai dengan bangkitnya Islam politik sebagai ejawantah (kristalisasi) dan situasi logis demokrasi. Dari warna dan jalur politik, gerakan yang muncul salah satu contohnya adalah Hizbut Tahrir Indonesia yang merupakan copy paste Hizbu Tahrir yang muncul di Timur Tengah (Libanon) yang didirikan oleh Taqiyuddin anNabhani. Kelompok Islam politik ini memiliki visi dan misi diantaranya memperjuangkan diterapkannya syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Cukup patut untuk dipertanyakan dan menjadi bahan penelitian yang seksama, apakah ghirah keIslaman yang muncul di masyarakat belakangan ini, yang ditandai dengan maraknya penggunaan jilbab dan pakaian Islami, gerakan shalat berjamaah hingga bermunculannya islamic center yang didukung sepenuhnya oleh Pemkot dan Pemkab di beberapa daerah sebagai bentuk kebangkitan Islam lokal Indonesia (Islam nusantara), atau dampak dari kehadiran Islam Trans Nasional? Akhirnya harus pula dipertanyakan bahwa apakah munculnya fenomena gerakan sosial muslim 411 dan Bela Fatwa MUI 212 adalah gerakan murni agama atau gerakan politik yang dimotori oleh orang-orang yang mendorong pada fundamentalisme Islam dan Islam radikal, patut dijadikan perhatian akademis khususnya para sosiolog muslim.

Gerakan Trans nasional Hizbut Tahrir dan Salafi Wahabi di Indonesia

Hizbut Tahrir (HT) didirikan pada 1953 oleh Taqi al-Din al-Nabhani di Jerusalem. Al-Nabhani memiliki nama lengkap Muhammad Taqi al-Din ibn Ibrahim ibn Mustafa ibn Ismail ibn Yusuf al-Nabhani. Nama belakangnya, al-Nabhani, dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara. Al-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. Ia wafat pada tahun 1398/1977 M, dan dikuburkan di al-Auza'i, Beirut. (Syamsul Arifin: 2010) Bermula dari Palestina itulah, Hizbut Tahrir (HT) berkembang ke berbagai negara salah satunya Indonesia.

Syamsul Arifin mengutip pendapat Solahuddin yang menjelaskan bahwa Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia antara 1982-1983. Kehadiran Hizbut Tahrir ke Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tokoh yang bernama Mama Abdullah Nuh, pengelola Pesantren al-Ghazali, Bogor, yang juga dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pada saat itu ia mengundang Abdurrahman al-Baghdadi, seorang aktivis Hizbut Tahrir yang tinggal di Australia, datang ke Bogor membantu pesantrennya. Al-Baghdadi inilah yang kemudian yang kemudian menyebarluaskan gagasan Hizbut Tahrir melalui interaksi dengan para aktivis Islam di Masjid al-Ghifari, Institut Pertanian Bogor (IPB). Maka, berawal dari Bogor inilah gerakan Hizbut Tahrir (HT) menyebar sampai pelosok Nusantara. Dan kelompok radikal HT tersebut berkembang pesat setelah rezim Orde Baru tumbang. Institusi kepartaian Hizbut Tahrir yang didirikan al-Nabhani pada tahun 1953 merupakan basis perjuangan Hizbut Tahrir untuk mendirikan kembali daulah khilafah Islam.

Peristiwa sejarah dalam Islam yang dipandang Hizbut Tahrir sebagai momentum kehancuran daulah khilafah Islam adalah setelah kekuasaan Abdul Madjid II berakhir. (Syamsul Arifin: 2014). Yakni penguasa ke-38 pada zaman kekuasaan Turki Ustmani. Mengenai hal ini, Sharif Zayed Kepala Kantor Media Hizbut Tahrir wilayah Mesir pernah menyatakan bahwa keruntuhan khilafah pada tahun 1924 masehi berada di tangan Mustafa Kemal. Menurutnya, sejak itulah umat Islam kehilangan seorang gembala yang peduli bagi urusan mereka, yang melindungi Islam dan

membela kaum muslim.¹ Berdasarkan peristiwa tersebut, Hizbut Tahrir (HT) oleh al-Nabhani dimaksudkan sebagai basis politik untuk memperjuangkan umat Islam agar bisa bebas dari kemunduran dan penderitaan yang telah berlangsung dalam waktu yang sangat panjang.²

Hizbut Tahrir (HT) memandang bahwa upaya untuk membebaskan umat Islam dari kemunduran dan penderitaan adalah jika syariat Islam bisa diterapkan secara menyeluruh. Hizbut Tahrir juga memandang bahwa yang bisa menjamin penerapan syariat Islam adalah daulah khilafah Islam.³ Maka berawal dari itulah, dalam beberapa Bulletin Dakwah Al-Islam yang dikeluarkan Hizbut Tahrir, sering ditemukan seruan untuk menegakkan daulah khilafah Islam.

Penetrasi paham fundamentalisme Islam ke Indonesia juga dilakukan oleh kelompok Salafi yang mengusung pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Ajaran Salafi masuk ke Indonesia melalui para sarjana alumni Timur Tengah, terutama mereka yang bersekolah di Universitas-Universitas di Arab Saudi dan Kuwait. Dua negara ini merupakan basis utama atau sentral gerakan Salafi seluruh dunia. Dua negara kaya minyak ini ditengarai sebagai sumber utama pendanaan bagi kelangsungan aktivitas gerakan salafi. Perkembangan gerakan salafi di Indonesia juga mendapat dukungan langsung melalui kehadiran tokoh-tokoh intelektual "Arab" di antaranya dari Arab Saudi sendiri, Kuwait dan Yaman. Beberapa tahun belakangan, gerakan salafi bermunculan di beberapa daerah di Indonesia seperti terlihat di Jakarta, Cileungsi, Bogor, Banten, Batam, Bekasi, Tasikmalaya, Nusa Tenggara Barat, Makasar, Solo dan yang lainnya.

Kelompok salafi muncul pertama kali pada akhir abad ke-19 (sembilan belas) di Saudi Arabia. Pengaruh Saudi Arabia mengalir ke Indonesia melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

¹ Sharif Zayed, Hizbut Tahrir adalah Gerakan Islam yang Bekerja Membangun Khilafah", dalam <http://hizbut-tahrir.or.id>, diakses 03 April: 2015

² Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis: Pengalaman Hizb al-Tahrir Indonesia*, (Malang: UMM Press. 2010), hlm.

³ Syamsul Arifin, *Studi Islam Kontemporer Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia*, (Malang: Intrans Publishing, 2010), hlm. 45

Sekembalinya para alumni LIPIA yang telah menuntaskan studinya di Saudi Arabia menandai kelahiran generasi Wahabi baru di Indonesia, diantaranya adalah Abu Nida, Ahmad Faiz Asifuddin dan Aunur Rafiq Gufron sebagai kader DDII.⁴ Mereka itu setelah kembali dari Saudi Arabia kemudian mengajar di Pesantren-pesantren, seperti pesantren Al-Mu'min di Ngeruki, pesantren Wathaniyah Islamiyah di Kebumen dan pesantren Al-Furqon di Gresik. Lembaga lembaga pendidikan ini berkarakter modern. Kurikulumnya menekankan pengajaran bahasa Arab, Teologi Islam dan Hukum Islam. Para alumni Saudi Arabia ini berkomitmen untuk menyebarkan wahabisme di bawah panji gerakan dakwah salafi. Menurutnya, umat Islam Indonesia butuh pemahaman Islam yang sejati sebagaimana di praktekkan Salafush Shaleh.⁵

Mereka biasanya membangun Masjid tersendiri yang tidak jauh dari rumahnya, kemudian melakukan dakwah salafi melalui ceramah-ceramah yang dilakukan pada waktu shalat Jum'at dan waktu-waktu shalat subuh serta dalam pengajian atau taklim yang dihadiri oleh kaum laki-laki atau yang disebut dengan istilah ikhwan. Dalam isi ceramahnya itu banyak masyarakat yang tidak setuju atau menentang, karena meresahkan masyarakat setempat yang sudah terbiasa melakukan qunutan, tahlilan, melaksanakan perayaan maulid dan isra mi'raj, mereka katakan itu adalah bid'ah dan sesuatu yang bid'ah itu adalah sesat. Beberapa tokoh yang pernah belajar di Pondok Pesantren Imam Buchori Solo seperti Ustadz Pawaz dan Ustadz Abu Zuhri, Ustadz Agus Hasan melalui persetujuan dari Ustadz Badrussalam dan Ustadz Yazid mendirikan Rodja yaitu radio dakwah ahlussunnah waljama'ah yang didirikan pada tahun 2004

Dengan masuknya ideologi Salafisme dari Timur Tengah (Islam Transnasional) ini, maka proses pembentukan identitas diri aktivis-aktivis

⁴ DDII adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, merupakan organisasi dakwah yang didirikan oleh Muhamad Natsir (1908-1993) dan para mantan Masyumi lainnya tahun 1967. Nurhaidi Hasan, 2008, hlm. 65

⁵ Salafush Shaleh adalah generasi pertama dari umat ini, yang pemahaman ilmunya sangat dalam, yang mengikuti petunjuk Nabi SAW serta menjaga sunahnya (Yazid bin Abdul Qodir Jawas, *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, 2006, h.34) Lihat juga definisi tersebut pada Zaenal Abidin bin Syamsuddin, *Buku Putih Dakwah Salafiyah*, (Bandung: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2009), hlm. 23

dakwah ini pun makin menemukan bentuknya secara konseptual, dimana mereka mampu mengembangkan diri sebagai bagian dari gerakan yang tidak hanya bersandar pada aktivitas pemurnian keagamaan semata, tapi juga dalam bentuk ideologi perlawanan atas berbagai paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti modernisme, sekularisme, kapitalisme, dan lain-lain.⁶ Percampuran pemikiran Salafi dan Ikhwanul Muslimin yang diambil DDII telah mengubah wajah Islam Indonesia pada periode 1970-an, yakni karakter Islam Indonesia yang radikal.

Terhadap kelompok-kelompok keagamaan transnasional di atas, respon penduduk negeri ini bervariasi. Ada yang apatis, menyambut baik dan ada yang menolak baik secara frontal maupun secara halus. Semua memberikan warna tersendiri bagi perkembangan kehidupan keagamaan di Indonesia. Yang menjadi fokus dari paparan ini adalah mengapa masyarakat muslim Indonesia yang didominasi oleh pengikut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bisa terpengaruh oleh gerakan Trans-Nasional tersebut?.

Dari Ketimpangan struktural hingga “Framing” Budaya: *Upaya Memahami Gerakan Trans-Nasional Islam dalam Merekrut Jemaah*

Suatu pendekatan atau teori yang paling awal dalam studi untuk memahami gerakan sosial adalah *Structural Strain* yang merupakan turunan dari kajian tentang perilaku masyarakat oleh *functionalist social psychology*. Teori ini beranjak dari asumsi yang menyatakan bahwa secara alamiah masyarakat akan menemukan sistem equilibriumnya. Dari perspektif tersebut, secara organik masyarakat akan mencari dan menciptakan infrastruktur kelembagaan yang dapat mengatur keseimbangan antara input dan output dalam sistem politik.

Tuntutan masyarakat tersebut biasanya diakomodir oleh lembaga yang responsif dalam menyalurkan dan menyuarakan kegelisahan atau kepentingan masyarakat tersebut menjadi suatu kebijakan atau kegiatan yang berarti secara optimal. Generasi pertama dari teori

⁶ Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 67

gerakan sosial mengambil akar dari fungsionalisme dan memfokuskan diri pada penyebab struktural dan psikologis dari mobilisasi masa.⁷ Menurut kaum fungsionalis, ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat muncul dari adanya ketimpangan struktural yang pada gilirannya akan melahirkan ketidakpuasan atau keresahan (*grievance*) dan terkikisnya efikasi institusi negara yang dapat melahirkan disfungsi patologis yang mengarah pada tidak setabilnya politik. Jika institusi-institusi formal tidak memiliki kapasitas untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat tersebut, maka akan menimbulkan frustrasi sosial dan kekacauan politik.⁸

Teori klasik ini menempatkan hubungan sebab akibat secara linear dimana hambatan/ketimpangan struktural mengakibatkan ketidaknyamanan psikologis yang berujung pada munculnya tindakan kolektif. Berbagai ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh hal-hal seperti industrialisasi, modernisasi, atau krisis ekonomi, menggoyahkan sendi kehidupan sosial masyarakat, paling tidak muncul sikap keraguan secara normatif maupun sosial tentang bagaimana menyikapi perubahan situasi tersebut.

Secara khusus teori-teori masa meyakini bahwa kelompok-kelompok intermediasi yang semestinya berfungsi mengintegrasikan individu kedalam perkembangan masyarakat dan politik terkikis peranannya sehingga memunculkan rasa kehilangan harapan, keputusan dan kemarahan. Perasaan diri terisolir dan terabaikan dari sebagian anggota masyarakat oleh perubahan masyarakat secara luas inilah yang dipercaya menjadi penyebab utama pada individu untuk bergabung dengan gerakan sosial tertentu. Gerakan sosial kemudian dipandang sebagai mekanisme tempat pelarian dimana individu merasa lebih diterima, merasa memiliki dan merasa mendapatkan kembali kekuatan dirinya.⁹

⁷ Sidney Tarrow McAdam, and Charles Tilly, *Towards An Integrated Perspective on Social Movements and Revolution*, Lazarsfeld Center, Columbia University 1982)

⁸ Huntington, *Political Order in Changing Societies*, (New Haven and London, Yale University Press. 1968)

⁹ Turner dan Killian, *Collective Behaviour*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1957), hlm. 23

Dari banyak penelitian tentang gerakan sosial di Timur Tengah dan Afrika yang dilakukan oleh sosiolog khususnya yang menggunakan teori ini dalam mendekati gerakan social Islam yang berkembang di sana hampir menemukan pola yang sama. Dekmejian menyatakan argumentasinya bahwa “*The scope and intensity of the fundamentalist reaction, ranging from spiritual awakening to revolutionary violence, depends on the depth and pervasiveness of the crisis environment*”.¹⁰ Hal ini dikuatkan oleh Esposito, seorang ahli politik Timur Tengah, dengan menyatakan bahwa meningkatnya ketimpangan sosial ternyata mengakibatkan meningkatnya respon terhadap hal tersebut dimana banyak individu mencari cara untuk menegaskan diri mereka atau mencari kompensasi dari protes mereka melalui agama.¹¹

Dari penegasan teori di atas, jika kita lihat pola rekrutment kedua kelompok Islam trans-nasional yakni HTI dan Salafi Wahabi khususnya yang dilakukan melalui dakwah kampus berpola sama. Dari situs khusus Dakwatuna diperoleh informasi bahwa mereka dalam memaksimalkan dakwah kampus tujuannya adalah mempengaruhi dan merekrut calon intelektual yang berpotensi menjadi kader dakwah dan kebanyakan LDK ini bergerak di kampus-kampus umum khususnya lebih efektif yang memiliki kajian sains, teknik dan sedikit sosial. Dari strategi mereka selain mahasiswa dan dosen dalam pendadaran awal biasanya mahasiswa disuguhi dengan persoalan global yang mengarah pada kritisisme kondisi yang ditimbulkan oleh kemoderenan.

Strategi ini disebut dengan *fikroh* yang gunanya mengarahkan mahasiswa calon rekrut menyadari adanya *gazwul fikr* yang dilakukan musuh Islam (Barat dan tak jarang juga alumni Barat) yang akan menyesatkan umat. Kemudian dengan strategi pelayanan dan tarbiyah mereka membangun opini tentang dakwah (*binna ru'yatul Islamiyah*). Begitu seterusnya hingga mencetak figur-figur massa untuk kepentingan sosialisasi pesan dan nilai-nilai Islam ke masyarakat luas (*binna syakhsiyah*

¹⁰ Dekmejian, *Islam and Revolution: Fundamentalism in the Arab World*, (Syracuse, NY, Syracuse University Press 1995), hlm. 6

¹¹ Esposito, *A The Islamic Threat: Myth or Reality*, (New York: Oxford University Press. 1992), hlm. 12-17

barizah). Strategi terakhir mereka adalah menjadi kelompok penekan yang efektif terhadap pengambil kebijakan di pemerintahan.¹²

Sementara itu, di luar kampus kelompok Salafi Wahabi dikenal dengan kelompok yang anti bid'ah dan dalam dakwah mereka biasanya mengulas akidah mereka dan bahaya bid'ah selain mendegradasi keIslaman yang asli Indonesia dan dikaitkan dengan bahayanya mengikuti perilaku yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu mereka sering mendiskreditkan kelompok Islam di luar mereka sebagai kelompok ahlu bid'ah, tidak islami dan mutasyabahah dengan kaum kafir. Bagi kelompok masyarakat muslim yang tidak dalam pemahaman keIslamannya seringkali mereka mudah terpengaruh dengan tuduhan ini dan bahkan terpesona dengan tampilan mereka yang menampakkan kedekatannya dengan Arab dalam beragama dan berbudaya. Pada kelompok masyarakat yang kecewa terpinggirkan oleh modernitas seringkali ini menjadi isu menarik dan tempat berlindung yang nyaman.

Selain itu, program beasiswa penuh yang disuguhkan melalui lembaga pesantren dan LIPIA yang mampu mengirimkan studi lanjut ke negara-negara seperti Arab Saudi, Libanon dan Mesir adalah merupakan peluang khususnya bagi kalangan tidak mampu untuk menjadi jalan bagi pengentasan kemiskinan dan obat kekecewaan atas ketimpangan yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan oleh liberalisme dan materialisme dari Barat.

Akan halnya dengan HTI, selain merekrut melalui dakwah kampus, organisasi ini membentangkan isu-isu internasional yang sarat dengan cacian dan hujatan terhadap Barat khususnya Amerika dan bahkan PBB. Saat ini, pengamatan terhadap situs-situs HTI menunjukkan intensitas mereka pada isu-isu Syuriah, Erdogan di Turki dan tentunya Israel sebagai cara untuk membangkitkan kebendian umat pada rezim-rezim yang pro Barat.¹³

¹² *Dakwatuna dan Helmi Dadang Blog Resume Buku Risalah Manajemen Dakwah Kampus March 22, 2010*

¹³ (lihat diantaranya <http://hizbut-tahrir.or.id/>)

Teori kedua yang mungkin bisa digunakan untuk memahami upaya mereka dalam merekrut dan menguatkan jemaah adalah dengan cara pencitraan kultur dan framing terhadap kelompok lain, khususnya Barat dan para penyokongnya. Sejak 1980-an, teori gerakan sosial telah tertarik pada peran faktor ideasional, termasuk interaksi sosial, makna, dan budaya.¹⁴ Selain dimensi strategis dan strukturalis mobilisasi diuraikan di *Resource Mobilization Theory* dan model proses politik, teori gerakan sosial telah menganggap penting tentang bagaimana mereka membuat individu membangun konsep diri mereka sebagai kolektivitas; bagaimana calon peserta yang benar-benar yakin untuk berpartisipasi; dan cara-cara di mana makna diproduksi/dibangun, diartikulasikan, dan disebarkan oleh aktor gerakan melalui proses interaktif. Dalam pengembangan pendekatan teoritis untuk gerakan sosial, kepentingan-kepentingan tersebut dapat dimanifestasikan melalui studi framing.¹⁵

David Snow dan Robert Benford mengidentifikasi tiga tugas utama framing untuk gerakan sosial. *Pertama*, gerakan membangun frame yang mendiagnosa kondisi sosial sebagai masalah yang membutuhkan perbaikan. Mereka sekaligus membahas atribusi tanggung jawab dan target dari kesalahan. *Kedua*, gerakan menawarkan solusi untuk masalah tersebut, termasuk taktik tertentu dan strategi yang ditujukan untuk menjadi tawaran solusi untuk memperbaiki ketidakadilan. Dan *Ketiga*, gerakan memberikan alasan untuk memotivasi dukungan dan tindakan kolektif. Sementara calon jemaah dapat berbagi pemahaman umum tentang penyebab dan solusi untuk masalah tertentu, frame motivasi yang diperlukan untuk meyakinkan calon jemaah untuk benar-benar terlibat dalam aktivisme, sehingga mengubah publik penonton menjadi peserta gerakan.¹⁶

¹⁴ Morris dan Mueller, *Frontiers in Social Movement Theory*, (New Heaven, Conn. Yale University Press. 1992); Laraña et al 1994; Johnston dan Klandermans 1995)

¹⁵ Wiktorowicz, *Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach*, (New York: Indiana University Press. 2004)

¹⁶ David Snow dan Robert Benford, Conceptualizing Islamic Movements: The Case of Turkey, *International Political Science Review* (2009), Vol. 30, No. 1, 89-103

Pada kasus gerakan Salafi Wahabi, cara-cara sebagaimana dijelaskan diatas dilakukan dengan mengedepankan slogan pemberantasan *khurafat* dan *takhayul* serta menuduh praktek bid'ah dari keagamaan masyarakat muslim Indonesia selama ini, khususnya terhadap para pengikut Nahdlatul Ulama atau nahdhiyin, Tarbiyah Islamiyah dan Jemaah Tabligh. Melalui propaganda ini mereka seolah menjanjikan Islam yang orisinal sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Tentunya bagi masyarakat awam agama tapi terdidik secara intelektual hal tersebut seringkali menjadi tawaran yang solutif terhadap kekacauan hidup yang melanda lingkungan di sekitar mereka.

Baik kaum Salafi Wahabi maupun HTI sangat berkepentingan terhadap penerapan syari'ah di berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut merupakan kelanjutan setelah proses framing yang dilakukan terhadap kelompok yang mereka pandang sebagai others, sebagai upaya solusi yang mereka tawarkan terhadap umat untuk mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang biasanya mereka alamatkan penyebabnya ke Barat dan pemerintahan penyokongnya. Tidak cukup sampai di situ, persoalan syariah yang mereka kupas pada akhirnya juga berlanjut ke persoalan politik, yakni tentang bagaimana hukum memilih pemimpin yang bukan muslim. Sekalipun dalam masalah ini antara kedua kelompok ini berbeda khususnya dalam intensitas pandangan mereka, dimana HTI jauh lebih keras dan bahkan bertujuan menjadikan Indonesia menjadi negara dengan sistem khilafah, namun secara prinsip Salafi Wahabi juga lebih setuju terhadap pemimpin yang dapat menjamin dan sesuai haluan mereka.

Disisi lain, pandangan dikotomis Islam-Barat tidak hanya membuat HTI intoleran terhadap Barat, tetapi juga kritikal terhadap Muslim yang mengadopsi budaya Barat. HTI meyakini khilafah sebagai satu-satunya sistem negara Islam, para aktivisnya menyalahkan Muslim yang mempraktikkan demokrasi, mendirikan partai, dan menerima konsep negarabangsa. Dari sisi ini, HTI tidak hanya bersikap fundamentalis karena ingin menerapkan ajaran Islam secara utuh, tetapi juga radikal karena menolak segala sesuatu yang dianggap bukan berasal dari Islam. Akibatnya, sikap inklusifnya yang tidak membedakan kelompok Muslim berubah menjadi eksklusif begitu melihat corak pemikirannya

yang cenderung dikotomis, atau bahkan antagonis, dalam menyikapi hubungan Islam dengan kelompok lain.¹⁷

Kesimpulan

Kedua teori ini masih relevan untuk memahami bagaimana kedua kelompok gerakan trans-nasional ini dapat memperoleh pengikut di Indonesia yang sesungguhnya telah dikuasai oleh gerakan sosial Islam lokal yang besar yakni NU dan Muhammadiyah. Globalisasi yang melanda negeri ini dan ditunjang oleh adanya reformasi yang memberikan keterbukaan pada ruang publik juga telah dimanfaatkan oleh kedua gerakan ini untuk menjangkau umat yang lebih luas dibanding upaya mereka di tahun 70 dan 80an. Sangat mungkin, bahwa gerakan 411 dan 212 belakangan ini adalah bentuk manefsto dari kelompok ini yang telah dengan secara halus mengemasnya dengan menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat saat terakhir yakni singgungan Ahok atas surat al Maidah.

Drs. Dardiri, MA; *Dosen Tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau Riau*

¹⁷ Nasarudin Umar dalam Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet I, 2011)